Optimalisasi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya melalui Identifikasi Sektor Ekonomi Basis

Vidya Puspita
Prodi Magister Perencanaan & Wilayah, Universitas Diponegoro, Semarang

* E-mail corresponding author: vidyapuspita@students.undip.ac.id

Received: 14-12-2021;
Accepted: 19-04-2022;
Available online: 29-04-2022

Ecoplan

Vol. 5 No. 1, April 2022, hlm 87-95
ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Abstract *- In order to support regional development efforts, comprehensive planning is needed. One of which is by strengthening the leading economic sectors in the region, which can become potential that optimizes the development process. This study aims to identify potential basic economic sectors in order to support the planning & development of Palangka Raya City. The analysis was carried out using secondary and time series data (in 2018 and 2020). It examined the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Palangka Raya City and Central Kalimantan Province collected from the Center Bureau of Statistics publications. The analytical tools used in this research were LQ and shift-share analysis. Based on the LQ analysis, the most dominant sectors supporting economic growth in Palangka Raya City are electricity & gas procurement (4.61), government administration of defense and mandatory social security (3.38), and the provision of accommodation, food, and drink (2.70). Meanwhile, the shift-share analysis revealed that 3 (three) sectors are growing faster, more advanced, and more competitive compared to other regions in Central Kalimantan Province. These sectors include the electricity & gas procurement sector (0.56), information & communication (0.29), as well as health services & social activities (0.22). Based on the priority scale, which is a combination of LQ and shift-share analysis, the basic economic sectors in Palangka Raya City are the electricity and gas procurement sector as well as the defense and social security government administration sector. It is hoped that the Palangka Raya City government can coordinate with Hiswana Migas to hold an SPPBE that can absorb a large number of workers. Corporates should also be able to partner with the government in supporting the provision of local government needs effectively and efficiently.*

Keywords: ***LQ (Location Quotient), Shift Share, Population Trend, Palangka Raya City***

Abstrak – Dalam rangka mendukung upaya pembangunan diperlukan perencanaan yang komprehensif salah satunya dengan memperkuat sektor ekonomi unggulan pada wilayah tersebut, yang mampu menjadi potensi guna mendorong pembangunan untuk optimal . Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi basis yang potensial dalam rangka mendukung perencanaan & pembangunan Kota Palangka Raya. Analisa sektor ekonomi basis potensial di Kota Palangka Raya dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan bersifat time series (tahun 2018 dan 2020) berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis LQ dan Shift Share. Analisis LQ menyatakan sektor yang paling dominan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya adalah pengadaan listrik & gas sebesar (4,61), administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar (3,38) serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (2,70). Sedangkan dari hasil analisis shift share diketahui terdapat 3 (tiga) sektor yang tumbuh lebih cepat, maju dan berdaya saing dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sektor pengadaan listrik & gas (0,56), informasi & komunikasi (0,29), serta jasa kesehatan & kegiatan sosial (0,22). Berdasarkan skala prioritas yang merupakan kombinasi analisa LQ dan Shift Share didapatlah sektor ekonomi basis di Kota Palangka Raya yaitu sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial. Diharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat berkoordinasi dengan Hiswana

Migas untuk mengadakan SPPBE yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pelaku usaha pun agar dapat bermitra dengan pemerintah dalam menunjang penyediaan kebutuhan pemda dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: LQ (Location Quotient), Shift Share, Trend Kependudukan, Kota Palangka Raya.

PENDAHULUAN

Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika menyebabkan guncangan ekonomi hampir diseluruh dunia tidak terkecuali negara berkembang seperti Indonesia. Pada akhir tahun 2019 ketegangan itu sedikit mencair dengan dibuatnya kesepakatan baru sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit membaik (Bappenas, 2020). Namun demikian, wabah virus COVID-19 yang menyerang seluruh dunia hingga menjadi pandemi global dapat mengganggu kestabilan perekonomian dunia. Tidak terkecuali Indonesia yang terkena bencana nasional wabah COVID-19 mulai April 2019 yang ditetapkan secara resmi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Kondisi penyebaran virus yang begitu cepat membuat kekhawatiran serius yang dapat mengakibatkan terpuruknya sektor ekonomi karena diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (*lockdown*). Pembatasan disegala aspek mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan terkait secara langsung pada peningkatan angka kemiskinan (Aeni, 2021).

Sektor ekonomi merupakan faktor penting dalam penilaian pembangunan, hal ini dikarenakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah atau wilayah (Jhingan, 2016). Akan tetapi, dibuatnya kesepakatan dunia yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang menuntut keseimbangan pembangunan pada setiap sektor baik ekonomi, sosial & lingkungan. Pembangunan keberlanjutan dapat dicapai jika ketiga sektor tersebut tidak saling dikalahkan (Fauzi and Oxtavianus, 2014). Pembangunan dikatakan optimal jika indikator ekonomi kearah positif, untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memahami betul potensi wilayah yang dimiliki agar mampu bersaing dan menjadi unggulan (Basuki and Gayatri, 2009; Erri and Asymar, 2021). Pengembangan pada sektor unggulan berpotensi mempercepat upaya pembangunan wilayah dengan mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran (Mamola, Marsega and Yulianti, 2021).

Kota Palangka Raya merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Tengah (Putra, Rusda and Aziz, 2020). Kondisi ini juga menjelaskan bahwa Palangka Raya berpotensi besar dalam memberikan efek pemerataan pada Kabupaten sekitarnya (Pratiwi and Kuncoro, 2016). Pada tahun 2015 Kategori Pengadaan Listrik dan Gas merupakan kategori yang paling tinggi tumbuh, akan tetapi peranannya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi saat itu hanya sebesar 0,02 persen (palangkaraya.go.id). Kemudian dari data BPS, Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah kategori utama penggerak perekonomian Palangka Raya, dimana kategori ini dilaksanakan oleh Pemerintah sehingga belum diketahui secara pasti kategori lainnya yang cukup besar berkontribusi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya.

Kabupaten Kotawaringin Timur juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pelabuhan mengalami pergeseran struktur ekonomi unggulan dari sektor pertanian mengarah pada sektor pengolahan (Pratiwi, 2019). Pada *time series* atau periode antara 2010 – 2016 dimana sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Palangka Raya yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Administrasi Pemerintahan (Situmeang, Siregar and Takari, 2019). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota serta jarak antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan ditemukannya pusat – pusat pertumbuhan salah satunya yaitu kota Palangka Raya (Putra, Rusda and Aziz, 2020). Penelitian lain yang dilakukan dengan lokasi Lombok Tengah, dimana lokasi tersebut menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dari hasil yang diperoleh sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, padahal KEK mandalika dibuat dengan mengandalkan sektor pariwisatanya (Zainuri, 2021).

Dari beberapa uraian diatas, maka terlihat telah banyaknya dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan pada suatu wilayah, bahkan salah satu penelitian terdapat dilokasi yang sama yaitu Kota Palangka Raya. Namun selain time series yang digunakan berbeda pembahasan juga belum disajikan secara lengkap dan mendalam. Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mendukung pembangunan wilayah/ kota maka perlu dilakukan analisis ekonomi untuk mendukung pertumbuhan wilayah/kota (Puspaningtyas et al., 2011). Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti ingin mengidentifikasi ekonomi basis kota Palangka Raya yang kompetitif dan berdaya saing dibanding daerah lain di Kalimantan Tengah. Diharapkan hasil penelitian mampu melengkapi pembahasan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, yang mana telah disesuaikan terhadap kondisi terbaru. Selain itu

tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai informasi berbasis data sektor ekonomi potensial yang patut diprioritaskan pengembangannya dalam penentuan perencanaan & pembangunan di Kota Palangka Raya ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi Daerah (Ekonomi Basis)

Pertumbuhan suatu wilayah dapat dilihat dan dinilai melalui pertumbuhan /pembangunan ekonomi pada daerah tersebut. Sejak dibuatnya Undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Zaris (dalam Afiat, 2018:55) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita. Sektor basis (unggulan) merupakan komoditas ekspor utama dari daerah/ wilayah, yang mampu menggerakan roda perekonomian dalam meningkatkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan (Yusral et al., 2015).

Laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang menyatakan kesehatan perekonomian. Indikator ini banyak didiskusikan oleh para ekonom, analis, investor dan para pembuat kebijakan. PDRB Kota Palangka Raya merupakan salah satu unsur pembentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 12,13 persen atau terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur (17,81%) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (12,84%) (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2020).

Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah daerah & masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pola kemitraan pemerintah dan swasta (Arsyad, 1999).

METODE PENELITIAN

Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik baik itu topografi, lokasi, penggunaan lahan yang tentu berpengaruh terhadap kondisi perekonomiannya. Hal ini yang mendasari penilaian khusus, teori basis ekonomi digunakan atas dasar sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah karena berisikan permintaan barang jasa dari luar (Arsyad, 2010).

Dalam rangka mengidentifikasi ekonomi basis di Kota Palangka Raya, subyek penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah per sektor-sektor perekonomian yang dibatasai pada tahun 2018 dan 2020. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengunduh dari situs/ *website* resmi Badan Pusat Statistik. Sumber data PDRB Kota Palangka Raya berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik yang tercantum pada Kota Palangka Raya Dalam Angka 2019 dan Kota Palangka Raya Dalam Angka 2021. Sedangkan data PDRB Provinsi Kalimantan Tengah per sektor perekonomian berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik yang tercantum pada Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2019 dan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021.

Jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode analisis *Location Quotient.* Alat analisis ini digunakan dengan tujuan untuk membandingkan besaran peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap peranan sektor tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten/kota terhadap peranan suatu sektor secara regional atau tingkat provinsi, dalam hal ini peranan suatu sektor di Kota Palangka Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan analisis Model Rasio Pertumbuhan merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi (sektor ekonomi) yang potensial, terutama struktur ekonomi Kota Palangka Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik internal maupun eksternal.

***Rumus analisa Location Quotient (LQ)*:**

Di mana:

LQ	=	Location Quotient
Ps	=	Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat lokal.
pl	=	Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat lokal.
Ps	=	Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkal regional.
Pl	=	Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal regional

Rumus diatas menjelaskan perbandingan kontribusi masing-masing sektor Jika nilai LQ > 1 maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor potensial (basis). Apabila nilai LQ < 1 maka sektor tersebut bukan merupakan sektor potensial (non basis) (Tarigan, 2005).

Analisa *Shift-Share* merupakan teknik yang menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor perekonomian regional/ nasional. Dengan demikian dapat ditemukan adanya pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerah.

$$PE = KPN + KPP + KPPW$$
$$= (Yt/Yo - 1) + (Yit / Yio - Yt/Yo) + (yit / yio - Yt/Yo)$$
$$= [Ra - 1] + [Ri - Ra] + [ri - Ra$$

Dimana:

Yt = indikator ekonomi wil. regional, akhir tahun analisis.
Yo = indikator ekonomi wil. regional, awal tahun analisis.
Yit = indikator ekonomi wil. regional sektor i, akhir tahun analisis
Yio = indikator ekonomi wil. regional sektor i, awal tahun analisis.
Yit = indikator ekonomi wil. Lokal sektor i, akhir tahun analisis.
yio = indikator ekonomi wil. Lokal sektor i, awal tahun analisis

$$LQ = \frac{ps/pl}{Ps/Pl}$$

Jika pergeseran tersebut bernilai positif (+) berarti sektor ekonomi tersebut bersifat kompetitif, namun sektor ekonomi yang nilainya negatif (-) mengindikasikan sektor tersebut tidak kompetitif jika dibandingkan dengan daerah lain/regional.

Kajian ini menggunakan data sekunder yang bersifat *time series* (tahun 2018 dan 2020) yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. Data-data sekunder itulah yang akan diolah dan dianalisa menggunakan metode *Location Quotients* (LQ) serta *Shift-Share* yang terdapat dalam teori Basis Ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah akan digunakan sebagai unsur/ faktor dalam menghitung besaran *Location Quotients* (LQ). Data PDRB Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018&2020 didapatkan dari publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik seperti tampak pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. PDRB Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dan 2020 (dalam Milyar Rp)

No.	Sektor / Sub Sektor	PDRB atas Dasar Harga Konstan			
		Kota Palangka Raya		Prov. Kalimantan Tengah	
		2018	2020	2018	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	241,4	273,3	19.824,6	21.227,4
B	Pertambangan dan Penggalian	122,6	124,9	14.754,1	14.105,7
C	Industri Pengolahan	1.009,0	1.017,0	14.736,8	15.327,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38,3	51,6	78,8	102,6
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	16,5	16,5	74,5	84,0
F	Konstruksi	1.064,6	1.020,2	7.994,9	7.598,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.964,7	2.094,2	11.241,1	11.823,0
H	Transportasi dan Pergudangan	906,1	811,6	6.051,2	6.307,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	477,2	461,7	1.608,7	1.635,3
J	Informasi dan Komunikasi	203,6	249,9	1.147,9	1.329,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	772,5	853,5	2.972,3	3.463,9

L	Real Estate	318,6	318,7	1.874,9	1.968,9
M,N	Jasa Perusahaan	7,5	7,1	35,0	32,2
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.097,8	2.258,9	5.514,1	6.562,9
P	Jasa Pendidikan	560,2	658,4	4.098,4	4.597,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,6	269,0	1.646,8	1.898,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya.	124,2	107,9	912,2	891,3

Sumber: BPS, 2019 dan 2021

Berdasarkan data PDRB pada tabel 1 dapat diketahui bahwa di Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PDRB dari tahun 2018 ke 2020. Sektor ekonomi yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya tidak mengalami perubahan pada tahun 2018 maupun 2020, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Tengah sektor ekonomi yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, baik pada tahun 2018 dan 2020 adalah sektor Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan. Terdapat perbedaan sektor ekonomi dominan antara Kota Palangla Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis Location Quotients (LQ) untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan Kota Palangka Raya terhadap daerah-daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah agar perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya dapat dilakukan untuk hasil yang lebih optimal.

Berikut disajikan perhitungan rata-rata LQ Kota Palangka Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dan 2020 pada tabel 2

Tabel 2. Rata-rata LQ Kota Palangka Raya-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dan 2020

No.	Sektor	LQ 2018	LQ 2020	LQ Rata-rata	Keterangan
1	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	0,1134	0,1203	0,1168	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0774	0,0827	0,0800	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,6375	0,6197	0,6286	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,5255	4,6975	4,6115	Basis
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2,0622	1,8347	1,9485	Basis
6	Konstruksi	1,2399	1,2541	1,2470	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,6274	1,6545	1,6409	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1,3942	1,2018	1,2980	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,7620	2,6371	2,6996	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,6515	1,7552	1,7033	Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,4199	2,3015	2,3607	Basis
12	Real Estate	1,5822	1,5119	1,5471	Basis
13	Jasa Perusahaan	1,9952	2,0595	2,0274	Basis
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,5423	3,2149	3,3786	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,2727	1,3377	1,3052	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,3095	1,3233	1,3164	Basis
17	Jasa Lainnya.	1,2677	1,1307	1,1992	Basis

Sumber : Hasil Analisis penulis, 2021

Hasil perhitungan rata-rata LQ tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa terdapat 14 (empat belas) sektor ekonomi basis di Kota Palangka Raya dengan kriteria hasil perhitungan LQ lebih besar dari satu (LQ>1). Sektor perekonomian basis di Kota Palangka Raya yang paling dominan mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain pengadaan listrik & gas (4,61), administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan

sosial wajib (3,38) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (2,70). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor perekonomian tersebut di Kota Palangka Raya laju pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat memenuhi kebutuhan di luar wilayah Kota Palangka Raya.

Dalam rangka membuat perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi selain mengetahui sektor ekonomi basis/ unggulan juga perlu untuk mengetahui peranan suatu sektor ekonomi maupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional atau tingkatan daerah yang lebih tinggi. Menurut Lincolin Arsyad dalam bukunya "Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah" menyebutkan bahwa analisa *shift share* sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional/ regional yang tingkatannya lebih tinggi dari daerah. Analisa ini dapat membandingkan laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor yang ada di wilayah/ daerah tertentu dengan laju pertumbuhan ekonomi regional/ nasional berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang sama dengan daerah. Pada perbandingan tersebut akan tampak penyimpangan/ pergeseran. Berdasarkan data dari BPS maka disajikan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya sebagai indikator ekonomi regional dan daerah/ lokal seperti pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisa Shift Share Kota Palangka Raya (dalam Prosentase)

No.	Sektor	Komponen Pertumbuhan Nasional (KPN)	Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW)	Proportional Shift (PS)
1	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	0,0464	0,0243	0,0857	0,1101
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0464	-0,0904	-0,0277	-0,1180
3	Industri Pengolahan	0,0464	-0,0063	-0,0385	-0,0448
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0464	0,2556	0,3008	0,5564
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,0464	0,0811	-0,0464	0,0347
6	Konstruksi	0,0464	-0,0960	-0,0881	-0,1842
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,0464	0,0053	0,0195	0,0248
8	Transportasi dan Pergudangan	0,0464	-0,0041	-0,1507	-0,1548
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0464	-0,0299	-0,0789	-0,1088
10	Informasi dan Komunikasi	0,0464	0,1121	0,1810	0,2931
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0464	0,1190	0,0584	0,1774
12	Real Estate	0,0464	0,0037	-0,0461	-0,0424
13	Jasa Perusahaan	0,0464	-0,1264	-0,0998	-0,2262
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0464	0,1438	0,0304	0,1741
15	Jasa Pendidikan	0,0464	0,0753	0,1289	0,2041
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0464	0,1065	0,1151	0,2216
17	Jasa Lainnya.	0,0464	-0,0693	-0,1777	-0,2470

Sumber : Hasil Analisis penulis, 2021

Nilai KPN positif artinya sektor di Kota Palangka Raya tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang benilai negatif mengindikasikan bahwa pertumbuhan di Kota Palangka Raya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai KPP positif bermakna bahwa sektor di Kota Palangka Raya tersebut merupakan sektor yang maju, sebaliknya apabila bernilai negatif berarti sektor tersebut belum maju. Nilai KPPW positif menunjukkan bahwa sektor di Kota Palangka Raya tersebut memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebaliknya apabila bernilai negatif berarti sektor tersebut tidak memiliki daya saing

Berdasarkan hasil analisa *shift share* yang telah dilakukan terdapat 3 (tiga) besar sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat, maju dan berdaya saing dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Tengah yang diindikasikan nilai *Proportional Shift* positif, antara lain sektor pengadaan listrik & gas (0,56), informasi & komunikasi (0,29), serta jasa kesehatan & kegiatan sosial (0,22). Berikut disajikan plotting hasil analisis sektor ekonomi unggulan dan potensial untuk menunjang pertumbuhan wilayah Kota Palangka Raya pada gambar 1.

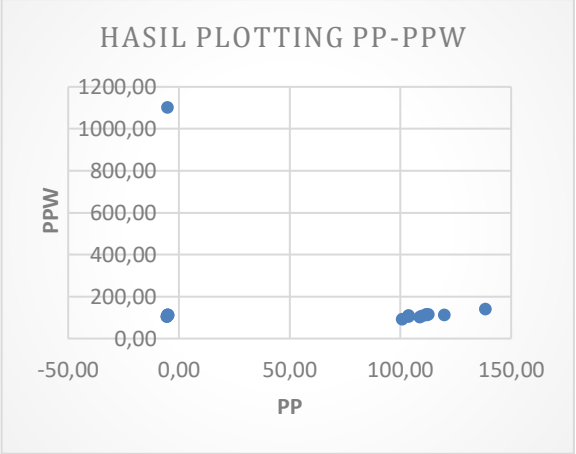

Gambar 1. Hasil Plotting PP-PPW

Dalam rangka mengkompilasikan hasil analisis *Location Quotients* (LQ) dan *Shift-Share* untuk mengetahui potensi ekonomi serta identifikasi sektor-sektor yang potensial dan prioritas di Kota Palangka Raya yang berguna juga untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka perlulah disusun tabel skala prioritas yang menunjukan sektor ekonomi prioritas seperti disajikan pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Skor Skala Prioritas Sektor Perekonomian di Kota Palangka Raya

Dari skor skala prioritas di atas maka dapat diidentifikasikanlah sektor perekonomian di Kota Palangka Raya yang menjadi prioritas dan basis ekonomi yaitu sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa *Location Quotients* (LQ) dan *Shift Share* yang telah dilakukan serta dikombinasikan menjadi skala prioritas didapatlah sektor ekonomi unggulan di Kota Palangka Raya antara lain sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial di Kota Palangka Raya lebih cepat daripada daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu pula sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial di Kota Palangka Raya mempunyai keunggulan spesialisasi dan komparatif dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh letak geografis Kota Palangka Raya yang jauh dari laut dan tidak memiliki pelabuhan sehingga kurang menarik minat investor/ pebisnis untuk membuka industri maupun pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Investor lebih memilih Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki pelabuhan laut. Hal ini menyebabkan sektor perekonomian yang aktivitasnya masih berkaitan erat dengan kepemerintahan menjadi unggulan di Kota Palangka Raya yaitu pengadaan listrik dan gas serta sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2017). Kota Palangka Raya dalam Angka 2017. Kota Palangka Raya.

Badan Pusat Statistik. (2018). Kota Palangka Raya dalam Angka 2018. Kota Palangka Raya.

Badan Pusat Statistik. (2019). Kota Palangka Raya dalam Angka 2019. Kota Palangka Raya.

Badan Pusat Statistik. (2020). Kota Palangka Raya dalam Angka 2020. Kota Palangka Raya.

Badan Pusat Statistik. (2021). Kota Palangka Raya dalam Angka 2021. Kota Palangka Raya.

Badan Pusat Statistik. (2019). Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2019. Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pusat Statistik. (2020). Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020. Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pusat Statistik. (2021). Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2021. Provinsi Kalimantan Tengah.

Aeni, N. (2021) 'Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial', *Jurnal Litbang Kabupaten Pati*, 17(1), pp. 17–34.

Afiat, M. N. (2018) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara', *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(2), p. 54. doi: 10.32833/majem.v6i2.48.

Arsyad, L. (1999) *Introduction to Regional Economic Planning and Development, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah). Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*.

Arsyad, L. (2010) *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima, Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.

Ayubi, A. A. (2014) 'Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1).

Bappenas (2020) *Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia, Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS*.

Basuki, A. and Gayatri, U. (2009) 'Penentu Sektor Uunggulan dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 10(1), pp. 34–50. doi: 10.18196/jesp.10.1.1280.

Erri, D. and Asymar, H. H. (2021) 'Potensi Ekonomi Rencana Kawasan Transmigrasi Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur', *Ecoplan*, 4(1), pp. 67–76. doi: 10.20527/ecoplan.v4i1.238.

Fauzi, A. and Oxtavianus, A. (2014) 'The Measurement of Sustainable Development in Indonesia', *Jurnal*

Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 15(1), p. 68. doi: 10.23917/jep.v15i1.124.

Jhingan, M. L. (2016) *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.

Mamola, R., Marsega, C. and Yulianti, W. (2021) 'Strategi Pengembangan Wilayah melalui Analithycal Hierarchy Proces (AHP) dengan Pendekatan Sectoral Economic Analysis di Povinsi Banten', pp. 47–60.

Pratiwi, M. C. Y. (2019) 'Potensi Sektor Unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur Analysis of Economic Structure Shift and Potency of Leading Sector of kotawaringin Timur Regency', *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(2), pp. 202–219.

Pratiwi, M. C. Y. and Kuncoro, M. (2016) 'Analisis Pusat Pertumbuhan dan Autokorelasi Spasial di Kalimantan: Studi Empiris di 55 Kabupaten/Kota, 2000–2012', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), pp. 81–104. doi: 10.21002/jepi.v16i2.574.

Puspaningtyas, A., Rochmah, S. and Mindarti, L. I. (2011) 'Analysis of Local Economic Potential and Competitiveness Economic Sector in Improving Local Economic Development (Study In Batu City)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), pp. 151–156.

Putra, D. A. W., Rusda, D. and Aziz, A. (2020) 'Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) dan Wilayah Belakang (Hinterland) Provinsi Kalimantan Tengah', *Ecoplan*, 3(2), pp. 105–118.

Rochmani, T. S., Purwaningsih, Y. and Suryantoro, A. (2017) 'Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 16(2). doi: 10.20961/jiep.v16i2.2322.

Siska, D. *et al.* (2015) 'Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agroindustri di Kawasan Andalan Kandangan Kalimantan Selatan', *Jurnal Bina Praja*, 07(02), pp. 99–110. doi: 10.21787/jbp.07.2015.99-110.

Situmeang, F. J., Siregar, M. and Takari, D. (2019) 'Analysis of the Main Economic Sectors in the City of Palangka Raya: Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kota Palangka Raya', *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya: GROWTH*, 5(1), pp. 28–45.

Tarigan, R. (2005) 'Ekonomi Regional Dan Teori Aplikasi', in. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Todaro, M. P. (1998) 'Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam', in *Jakarta: Erlangga*, pp. 18–23.

Tutupoho, A. (2019) 'Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku', *Jurnal Ekonomi*, 8(1), pp. 1–18.

Yunani, A. and Mursinto, D. (2014) 'Influence of Government Investment and Private Investment to Economic Growth, Manpower Absorption and Amount of Poor Population in Regencies/Cities in South Kalimantan Province in', *Journal of Economics and Sustainable Development*. Citeseer, 5(26).

Yusral, Junaidi and Bakti, A. (2015) 'Klasifikasi Pertumbuhan, Sektor Basis dan Kompetitif Kota Jambi', *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(4), pp. 103–111.

Zainuri, M. (2021) 'Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Lombok Tengah', *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 4(2), pp. 131–142. doi: 10.32630/sukowati.v4i2.223.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.